

## **Beda Jalan Sama Tujuan: Ancaman Politik sebagai Alternatif Ancaman Militer dalam Pelucutan Kedaulatan Negara di Era Demokrasi**

**Deden Habibi Ali Alfathimy<sup>1</sup>, Abdul Rivai Ras<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Strategik dan Global,  
Universitas Indonesia  
e-mail: deden.habibi@ui.ac.id

### **Abstrak**

Demokrasi menjadi asas politik yang semakin banyak diadopsi oleh negara-negara. Hal ini berdampak pada perubahan kecenderungan negara dalam mendapatkan dan/atau menggunakan ancaman militer terhadap satu sama lain. Namun, ancaman lain berupa ancaman politik mulai hadir sebagai alternatif. Dengan membahas hakikat ancaman militer dan ancaman politik secara teoretis, beserta sejumlah contoh kasus, artikel ini berargumen bahwa demokrasi menurunkan potensi ancaman militer antarnegara, tetapi meningkatkan potensi ancaman politik dengan dampak yang sama, yakni pelucutan kedaulatan negara.

**Kata kunci:** Ancaman Militer, Ancaman Politik, Politik Identitas, Kedaulatan Negara, Demokrasi.

### **Abstract**

Democracy has been adopted by many more countries as their political principle. This had impact on the changing tendency of states to obtain and/or use military threats against one another. However, other threats in the form of political threats began to appear as an alternative. By discussing the theoretical military threat and political threat, along with a number of case examples, this article argues that democracy reduces the potential military threat between countries, but increases the potential political threat with the same impact, namely the dismantling of state ownership.

**Keywords:** *Military Threats, Political Threats, Identity Politics, Sovereignty, Democracy.*

### **PENDAHULUAN**

Negara-negara mulai banyak beralih ke, atau lahir dengan, penggunaan asas demokrasi dalam pengelolaan kehidupan berpolitiknya. Hal ini tidak hanya berdampak terhadap perubahan cara hidup dan interaksi antarwarga negara secara domestik, tetapi juga terhadap hubungan antarnegara. Salah satu aspek yang paling signifikan dari perubahan ini adalah menurunnya jumlah konflik perang atau ancaman militer, terutama di antara negara-negara demokratis (Hayes, 2012).

Namun, eksistensi suatu negara yang demokratis sekalipun tidak dapat begitu saja bebas dari ancaman. Meskipun ancaman militer bisa dianggap menurun, ancaman-ancaman jenis lainnya muncul dan ternyata dapat menghasilkan dampak yang sama. Salah satunya adalah ancaman politik (Buzan, 1991). Hal yang ironis adalah ketika ancaman politik ini justru semakin berpeluang untuk muncul di negara-negara yang menganut asas demokrasi. Penyelidikan lebih lanjut terhadap perkembangan ini sangat penting untuk dikaji karena Indonesia sedang terus membangun kehidupannya yang masih rentan sejak era reformasi.

Untuk itu, artikel ini mencoba menggali sejumlah pemikiran teoretis yang terkait dengan penurunan kemungkinan munculnya ancaman militer, yang diiringi dengan kenaikan ancaman-ancaman politik sebagai imbas dari penerapan asas demokrasi di negara-negara. Secara empiris, artikel ini akan membahas sejumlah fenomena di beberapa negara, meliputi

kemerdekaan India, aneksasi Krimea oleh Rusia dari Ukraina, dan Pemilihan Presiden Amerika Serikat. Refleksi juga dilakukan pada sejumlah fenomena yang ada di Indonesia. Pada akhirnya, artikel ini berargumen bahwa di era demokrasi, ancaman politik muncul sebagai alternatif bagi ancaman militer yang sama-sama dapat menyebabkan terlucutnya kedaulatan suatu negara.

## METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif-deskriptif untuk menggali dua hal, yakni konsepsi keamanan militer dan politik serta contoh kasus ancaman politik. Data berupa data sekunder yang didapatkan melalui kajian pustaka. Kerangka teoretis dijadikan kerangka diskusi pada bagian Hasil dan Pembahasan.

## Kerangka Teoretis: Ancaman Militer Dan Politik (Identitas) Di Era Demokrasi

Ancaman militer masih ada dan relevan hingga saat ini. Kendati demikian, secara statistik, jumlah konflik berbasis militer atau perang menurun, terutama di antara negara-negara demokratis (Hayes, 2012). Penyebab dari penurunan ini oleh sejumlah pakar dianggap sebagai bukti bagi diterimanya argumen *democratic peace* dari Immanuel Kant (Kleingeld, 1998). Namun, penjelasan yang lebih komprehensif terhadap fenomena ini bisa diambil dari gagasan Kenneth Waltz (2001) mengenai hakikat dan penyebab perang.

Menurut Waltz (2001), hakikat dan penyebab perang bisa dicermati dalam tiga tingkat gambaran (*images*). Pada gambaran pertama (*first-image*), yakni tingkat individu, perang bisa tidak akan terjadi karena dua alasan yang berbeda, yakni alasan optimis dan alasan pesimis. Alasan optimis mengedepankan pendidikan sebagai cara untuk mencegah manusia mengambil jalan perang karena pada dasarnya semua manusia adalah baik. Sedangkan alasan pesimis melihat manusia pada dasarnya bersifat jahat sehingga mereka tidak akan berperang hanya bila terdapat kontrol eksternal. Di antara keduanya, alasan optimis lebih selaras dengan prinsip demokrasi, sedangkan alasan pesimis cenderung mengarah pada prinsip autoritarian atau totalitarian. Demokrasi yang dijalankan oleh orang-orang berpendidikan akan mencegah terjadinya perang.

Pada gambaran kedua (*second-image*), yakni tingkat negara, ada dua alternatif pencegahan perang: pendekatan liberalis dan pendekatan sosialis (Waltz, 2001). Menurut pendekatan liberalis, perang bisa dihindari jika masyarakat antarnegara dapat melakukan hubungan komunikasi dan perdagangan yang lebih bebas. Para sosialis menolak argumen tersebut karena perdagangan bebas justru semakin mempertajam kesenjangan antarkelas. Kesenjangan ini kemudian menjadi pangkal terjadinya perang. Kedua pendapat ini seringkali mengasosiasikan diri dengan demokrasi. Namun, pandangan liberal dianggap lebih dekat dengan demokrasi ketimbang sosialis yang pada praktiknya didemonstrasikan dalam bentuk autoritarian/totalitarian, seperti Uni Soviet dan Tiongkok.

Pada gambaran ketiga (*third-image*), yakni tingkat internasional, perang dapat dicegah dengan didirikannya suatu pemerintahan dunia untuk mengatasi sistem internasional yang anarki (Waltz, 2001). Tanpa adanya pemerintahan dunia ini, tidak ada landasan moral di antara mereka, melainkan rasionalitas kepentingan masing-masing negara. Autoritas tertinggi ini kemudian dapat menengahi konflik antarnegara yang biasanya diselesaikan dengan pemaksaan atau kekerasan.

**Tabel 1. Matriks Hakikat Perang Menurut Waltz (2001)**

	<i>Tingkat</i>	<i>Alternatif 1</i>	<i>Alternatif 2</i>
<i>Gambaran-pertama</i>	Individu	Optimis	Pesimis
<i>Gambaran-kedua</i>	Negara	Liberalis	Sosialis
<i>Gambaran-ketiga</i>	Sistem	Pemerintahan Dunia	Anarki
<i>Kecenderungan asas pemerintahan</i>		Demokrasi	Autoritarianisme/

		Totalitarianisme
--	--	------------------

Sumber: (Waltz, 2001) diolah Penulis.

Namun, kondisi ini bukan tanpa celah. Suatu negara yang demokratis bisa saja semakin terhindar dari pelucutan kedaulatan akibat ancaman militer, namun justru semakin terancam oleh asas demokrasi yang mereka anut. Kondisi ideal masyarakat yang terdidik yang digambarkan oleh para optimis di tingkat individual sulit dan bahkan cenderung mustahil dicapai. Sebagai implikasinya, masyarakat justru dijadikan bahan agenda populis yang mengedepankan identitas tertentu. Pada tingkat negara, demokrasi sendiri belum tentu mencegah perang satu sama lain akibat dari perbedaan bagaimana cara menafsirkan demokrasi itu sendiri. Di tingkat sistem internasional, pemerintahan dunia yang secara teoretis sangat menarik, tetapi pada kenyataannya akan tergerus oleh karakter anarkis hubungan internasional yang ada.

Kondisi non idealistik seperti ini ternyata semakin nampak pada beberapa tahun terakhir, terutama ketika Donald J. Trump terpilih sebagai Presiden AS pada 2016. Momen ini mendorong Francis Fukuyama (2018) mengembangkan gagasannya terkait politik identitas (*identity politics*). Dalam bukunya, Fukuyama berargumen bahwa kebutuhan dasar manusia adalah pengakuan (*recognition*) (D'Ambrosio, 2019). Kekurangan ataupun obsesi terhadap pemenuhan kebutuhan ini dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik, meskipun di tengah-tengah masyarakat yang demokratis. Namun, Fukuyama tidak hanya menyimpulkan bahwa politik identitas selalu berdampak negatif karena pada dasarnya kebutuhan ini tidak dapat dihindari. Justru, penguatan identitas nasional bisa diupayakan dalam rangka mempersatukan, alih-alih memecah belah, sehingga pada akhirnya dapat menghindari politik populis yang ada saat ini (Anderson, 2019).

Dengan potensi konflik akibat politik identitas yang kembali mengemuka akhir-akhir ini, kita perlu meninjau kembali pola-pola identitas utama yang sudah ada di dunia ini yang berkemungkinan besar akan memainkan peranan penting. Identitas-identitas utama dunia yang diramalkan akan senantiasa mengalami hubungan yang bersinggungan atau konflikual bisa dilihat dari *The Clash of Civilizations* karya Samuel Huntington (Huntington, 1996). Identitas utama ini terdiri dari *Western, Latin America, Orthodox, Eastern World, Muslim world, Sub-Saharan Africa*, dan lainnya. Meskipun Huntington menyebutnya masing-masingnya sebagai *cultural identity*, prospeknya untuk dijadikan pijakan *identity politics* sangatlah besar. Peradaban-peradaban ini pun tidak lagi terkonsentrasi di wilayah teritorial tertentu, melainkan saling berbaur di berbagai negara. Artinya, potensi konflik di antaranya bisa juga terjadi di level domestik suatu negara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bukti Ancaman Politik di India, Ukraina, dan Amerika Serikat

Di antara contoh-contoh kemampuan ancaman politik dalam pelucutan kedaulatan suatu negara, India, Ukraina, dan Amerika Serikat mendemonstrasikan kasus-kasus yang menarik untuk dibahas karena perbedaan kondisi ketiganya. Dari India, fenomena yang akan dibahas adalah pergerakan kemerdekaannya. Selanjutnya, dari Ukraina, fenomena aneksasi wilayah Krimea oleh Rusia menjadi hirauan. Sedangkan dari Amerika Serikat (AS), pembahasan difokuskan kepada kericuhan yang terjadi pada masa Pemilihan Presiden AS (Pilpres AS) 2020.

Pada kasus India, kemerdekaan yang pergerakannya dipimpin oleh Mahatma Gandhi dilakukan dengan kampanye berupa ketidakpatuhan sipil (*civil disobedience*) terhadap Pemerintah kolonial Inggris sebagai unit politik yang sah saat itu (McAlexander, 2020). Gandhi bisa saja memobilisasi rakyat India untuk melakukan revolusi dan perlawanan secara fisik terhadap Pemerintahan kolonial Inggris. Namun, Gandhi lebih memilih jalan ancaman politik untuk melucuti kedaulatan Inggris di India. Gandhi mengangkat identitas sebagai alat pemersatu masyarakat, khususnya identitas agama (Farooqui, 2020). Perlawanan politik ini

pada gilirannya berimbas pada sektor-sektor kehidupan lainnya hingga akhirnya Inggris terpaksa mendekolonisasi India.

Pada kasus Ukraina, khususnya tahun 2014, aneksasi Rusia terhadap wilayah Krimea menunjukkan bahwa ancaman politik berperan lebih signifikan dibandingkan ancaman militer terhadap Pemerintah Ukraina yang sah (Biersack & O'lear, 2014). Identitas kembali menjadi bagian utama dalam proses ini ketika etnisitas Rusia diangkat sebagai legitimasi pelepasan Krimea dari Ukraina (Teper, 2016). Kondisi ini menimbulkan sejumlah spekulasi apakah Rusia berada di belakangnya itu atau tidak. Namun, yang jelas, Rusia tidak melewatkan momen ini untuk meligitimasi penganeksasian Krimea sebagai suatu tindakan yang sah (Hopf, 2016). Kecaman sejumlah negara terhadap Rusia ternyata tidak dapat mencegah tindakan ini karena, secara *de facto*, Pemerintah Ukraina sudah tidak lagi memiliki legitimasi, dan pada akhirnya kedaulatan, atas Krimea.

Sedangkan pada kasus Amerika Serikat (AS), keriuhan pada masa Pilpres AS 2020 menunjukkan bahwa kekuatan militer yang tak tertandingi tidak menjamin suatu negara untuk terlepas dari ancaman politik. Presiden Trump memenangkan Pilpres AS 2016 secara mengejutkan (Martí, 2019). Banyak yang berspekulasi bahwa terdapat intervensi Rusia dalam kemenangan Presiden Trump ini (Inkster, 2016; Kellner, 2018). Selain itu, politik identitas yang dikampanyekan oleh Trump juga dianggap menjadi daya ungkit untuk mendulang para pemilih konservatif di Amerika Serikat yang notabene beretnis tertentu dan berpendidikan rendah (Berezin, 2017). Masyarakat minoritas seperti orang kulit hitam dan Muslim dijadikan sasaran kebencian (Magan, 2020). Selama masa kepresidenannya, politik identitas ini terus dirawat hingga akhirnya memuncak ketika Pilpres AS 2020 menghasilkan kekalahan bagi Trump (Cohen, 2020). Para pendukung fanatik Trump berusaha menghimpun kekuatan untuk mendelegitimasi hasil pemilihan tersebut dan secara anarkistis menduduki gedung-gedung pusat pemerintahan di Washington D.C (theGuardian, 2021).

Terlepas dari perbedaannya, ketiga kasus ini menunjukkan kesamaan, yakni efektivitas ancaman politik terhadap pelucutan kedaulatan entitas politik yang berdaulat, khususnya melalui politik identitas. Gandhi berhasil mengangkat potensi identitas peradaban India sebagai alat pemersatu dan penghimpun kekuatan yang mengancam Inggris secara politik. Kelemahan sistem politik Ukraina berhasil dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk mendelegitimasi kedaulatan Ukraina di wilayah Krimea sehingga dimanfaatkan oleh Rusia. Di Amerika Serikat, Pilpres AS 2020 menunjukkan bahwa politik identitas menjadi titik lemah di dalam suatu negara *superpower* yang hampir mustahil untuk ditantang secara militer sekalipun.

### **Refleksi bagi Indonesia**

Sebagai salah satu negara yang menganut asas demokrasi, Indonesia belum bisa dikatakan lepas dari kerentanan. Pembangunan demokrasi di Indonesia sejak kemerdekaannya pun melalui berbagai fase dan cita rasa demokrasi yang berubah-ubah. Selama proses ini pula, tantangan peluang dan tantangan dari demokratisasi ini hadir dalam upaya mempertahankan kedaulatan Indonesia. Berkat demokrasi, Indonesia mendapatkan kemerdekaannya, tetapi juga terlucuti kedaulatannya dalam sejumlah kesempatan.

Tidak seperti India, kemerdekaan Indonesia diraih dengan revolusi militer terhadap Belanda. Bantuan komunitas internasional untuk menekan Belanda juga menjadi salah satu faktor pendukung kemerdekaan. Ancaman politik justru datang dari para penguasa daerah dan kelompok-kelompok berbasis etnis maupun agama sebelum Republik Indonesia betul-betul diterima oleh seluruh Nusantara (Klinken, 2018). Hal ini bisa juga dilihat dalam proses perumusan dasar negara Pancasila, yang mulanya Piagam Jakarta. Rakyat Indonesia di bagian Timur saat itu tidak akan mengakui Republik Indonesia bila Piagam Jakarta tidak diubah ke dalam bentuk yang lebih demokratis dan netral dari dominasi golongan tertentu (Syarif, 2016). Meskipun akhirnya Pancasila lahir dalam bentuknya yang sekarang, sejak saat itu, potensi ancaman politik identitas terus hadir hingga saat ini.

Lepasnya Timor Timur melalui referendum merupakan salah satu contoh dampak ancaman politik yang sangat kentara (Kingsbury, 2010). Meskipun peran militer sangat

signifikan di dalam kasus ini, kegiatan referendum menunjukkan bahwa ancaman politik justru merupakan kunci. Politik identitas yang telah sukses ditertibkan oleh Pemerintah Indonesia selama beberapa puluh tahun akhirnya muncul kembali dan menguat. Dari sisi internasional, politik identitas ini kemudian disambut oleh negara-negara, khususnya Australia dan sekutunya, serta lembaga-lembaga internasional. Ini menunjukkan bahwa asas demokrasi yang hendak diaplikasikan secara tiba-tiba oleh Presiden Habibie saat itu menjadi bumerang tersendiri dalam kasus ini hingga akhirnya Timor Timur memerdekakan diri berdasarkan hasil referendum yang diintervensi oleh pihak-pihak asing (Kusuma, 2017). Kondisi dan potensi masalah yang serupa kini muncul dalam isu kemerdekaan Papua.

Pada kasus Papua, pelecahan etnis Papua oleh segelintir oknum kemudian dieskalasi menjadi gerakan besar-besaran untuk menghimpun kembali upaya pelepasan Papua (Djunatan, 2014). Ancaman politik ini kemudian semakin sulit untuk ditanggulangi dengan gencarnya intervensi dari luar negeri yang kini memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi (Megantara, 2013). Pendekatan militer kemudian sudah tidak bisa lagi dijadikan tumpuan utama. Namun, di sisi lain, penerapan nilai-nilai demokrasi yang tidak terkendali justru memberikan peluang bagi para pemberontak di dalam maupun luar negeri. Padahal, kesenjangan ekonomi di antara masyarakat Papua sendiri merupakan suatu permasalahan (Rahab, 2016) yang akhirnya tertutupi oleh politik identitas ini.

Konflik antarumat beragama juga masih hadir dan menantang kedaulatan Indonesia. Beberapa kasus kunci meliputi konflik Ambon (Schulze, 2002), konflik Poso (Schulze, 2019), dan ekstremisme. Pada konflik Ambon dan Poso (Schulze, 2019), prediksi Huntington mengenai kemungkinan benturan peradaban Islam dan Kristen terlihat dalam skala yang tidak begitu besar namun sangat mengkhawatirkan. Korban banyak berjatuh dan Pemerintah tidak bisa segera menanggulangnya. Konflik ini pun berpotensi untuk tereskalasi ke tingkat nasional bila Pemerintah saat itu semakin terlambat mengintervensi (Al Qurtuby, 2013). Meskipun konflik ini bersifat horizontal dan cenderung sosial, potensi untuk berubah menjadi ancaman politik dapat menghadirkan ujian yang serius bagi penegakan kedaulatan Indonesia.

Sedangkan pada kasus yang melibatkan ekstremisme, Pemerintah Indonesia langsung berhadapan secara vertikal. Pengaplikasian asas demokrasi pasca reformasi ternyata memungkinkan tumbuhnya pergerakan seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) yang secara terang-terangan menantang bangunan sistem politik Indonesia. HTI gencar mengampanyekan sistem *khilafah* untuk mengganti sistem politik Indonesia, sedangkan FPI mengenyampingkan kewenangan para penegak hukum yang sah dalam berbagai aksinya. Keduanya mendasarkan diri pada identitas agama Islam yang seringkali dihadapkan pada peradaban Barat yang selama ini dituduh memengaruhi politik Indonesia. Untuk menertibkan situasi ini, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian disahkan menjadi undang-undang. Tindakan ini dianggap efektif meredam ancaman politik tersebut, namun dilalui dengan mengompromikan nilai-nilai demokrasi.

Konflik antaretnis yang sifatnya mungkin cenderung di sektor sosial, bisa dilihat sudah masuk ke sektor politik pada kasus Basuki Tjahja Purnama atau Ahok (Hadiz, 2019; Osman & Waikar, 2018), serta permasalahan Papua yang telah dibahas sebelumnya. Sentimen anti-Cina dan anti-Kristen dalam pemilihan pimpinan politik masih menjadi fakta yang tidak bisa dihindarkan dalam kasus Ahok. Ini tentunya sudah bukan lagi konflik bernuansa sosial-kemasyarakatan, tetapi sudah mewujudkan sebagai ancaman politik bagi sistem pemerintahan di Indonesia. Kondisi ini tidak hanya ditemukan di DKI Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Bila ancaman politik ini tidak segera ditanggulangi, polarisasi etnis maupun agama bisa semakin runcing dan meningkat ke tingkat nasional.

## SIMPULAN

Demokrasi ternyata seperti pisau bermata dua. Di satu sisi dia dapat meredam peluang munculnya ancaman-ancaman militer, namun di sisi lain, ancaman-ancaman politik semakin berpeluang untuk menghadirkan dampak yang sama, yakni pelucutan kedaulatan negara.

Pemahaman mengenai hakikat perang dari Waltz yang kemudian dihadapkan pada argumentasi politik identitas dari Fukuyama beserta konfliknya dari Huntington menjadi dasar pemikiran yang logis mengenai potensi naik-turunnya kedua ancaman tersebut. Kasus-kasus seperti kemerdekaan India, aneksasi Krimea, dan Pilpres AS menunjukkan bahwa ancaman politik sama efektifnya dengan ancaman militer.

Indonesia sebagai negara demokrasi pun sudah mengalami sejumlah fase sejarah pengembangan demokrasi dan ujian kedaulatannya sehingga perlu mengambil pelajaran dan langkah-langkah strategis untuk menanggulangi ancaman politik tersebut. Proses revolusi kemerdekaan, terlepasnya Timor Timur, hingga konflik etnis/agama kontemporer menjadi pelajaran besar mengenai risiko penerapan asas demokrasi di Indonesia. Meskipun begitu, ini bukan berarti menempatkan demokrasi sebagai sumber masalah, melainkan memperlakukannya sebagai peluang untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih kuat dan tangguh. Ketangguhan ini pula yang dibutuhkan agar Indonesia dapat menghadapi segala ancaman tanpa intervensi asing. Berdasarkan ketiga gambaran Waltz, Indonesia sebagai negara perlu: (a) mengintensifkan pendidikan insan-insan demokratis yang toleran dan anti-politik identitas; (b) merencanakan sistem politik demokratis yang meminimalisasi polarisasi; dan (c) memperjuangkan perdamaian dan kepentingan nasional dalam pergaulan internasionalnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al Qurtuby, S. (2013). Peacebuilding in Indonesia: Christian–Muslim Alliances in Ambon Island. *Islam and Christian–Muslim Relations*, 24(3), 349–367.
- Anderson, A. B. (2019). Book Review: Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, by Francis Fukuyama. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2018, 218 pp. *Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe (JEMIE)*, 18(1), 47–52.
- Berezin, M. (2017). On the construction sites of history: Where did Donald Trump come from? *American Journal of Cultural Sociology*, 5(3), 322–337.
- Biersack, J., & O'lear, S. (2014). The geopolitics of Russia's annexation of Crimea: Narratives, identity, silences, and energy. *Eurasian geography and economics*, 55(3), 247–269.
- Buzan, B. (1991). *People, States & Fear: An agenda for international security studies in the post-cold war era*. Harvester Wheatsheaf.
- Cohen, A. (2020, November 20). Five reasons Trump's challenge of the 2020 election will not lead to civil war. *The Conversation*. <http://theconversation.com/five-reasons-trumps-challenge-of-the-2020-election-will-not-lead-to-civil-war-150320>
- D'Ambrosio, P. J. (2019). Review of Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment. *Philosophy Today*, 63(3), 757–761. <https://doi.org/10.5840/philtoday2019633282>
- Djunatan, S. (2014). Membawa Keadilan Bagi Identitas-Diri Orang Papua. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), Article 2. <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/1492>
- Farooqui, A. (2020). Gandhi's Spiritual Politics: Austerity, Fasting and Secularism. *Studies in History*, 36(2), 178–205. <https://doi.org/10.1177/0257643020953564>
- Fukuyama, F. (2018). *Identity: The demand for dignity and the politics of resentment*. Farrar, Straus and Giroux.
- Hadiz, V. R. (2019). The 'Floating'Ummah in the Fall of 'Ahok'in Indonesia. *TRaNS: Trans-Regional and-National Studies of Southeast Asia*, 7(2), 271–290.
- Hayes, J. (2012). The democratic peace and the new evolution of an old idea. *European Journal of International Relations*, 18(4), 767–791. <https://doi.org/10.1177/1354066111405859>
- Hopf, T. (2016). 'Crimea is ours': A discursive history. *International Relations*, 30(2), 227–255. <https://doi.org/10.1177/0047117816645646>
- Huntington, S. P. (1996). *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. Simon & Schuster.

- Inkster, N. (2016). Information warfare and the US presidential election. *Survival*, 58(5), 23–32.
- Kellner, D. (2018). Donald Trump, Globalization, and the Russia Connection in Election 2016. *Cultural Politics*, 14(2), 139–152.
- Kingsbury, D. (2010). National Identity in Timor-Leste: Challenges and Opportunities. *South East Asia Research*, 18(1), 133–159. <https://doi.org/10.5367/000000010790959820>
- Kleingeld, P. (1998). Kant's Cosmopolitan Law: World Citizenship for a Global Order. *Kantian Review*, 2, 72–90. <https://doi.org/10.1017/S1369415400000200>
- Klinken, G. van. (2018). Citizenship and local practices of rule in Indonesia. *Citizenship Studies*, 22(2), 112–128. <https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1445489>
- Kusuma, A. J. (2017). Pengaruh Norma HAM Terhadap Proses Kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 1–13.
- Magan, I. M. (2020). On being black, Muslim, and a refugee: Stories of Somalis in Chicago. *Journal of Immigrant & Refugee Studies*, 18(2), 172–188.
- Martí, G. (2019). *The Unexpected Orthodoxy of Donald J. Trump: White Evangelical Support for the 45th President of the United States*. Oxford University Press US.
- McAlexander, R. (2020). *The Politics of Anticolonial Resistance: Violence, Nonviolence, and the Erosion of Empire* [Columbia University]. <https://doi.org/10.7916/d8-3pmj-rt61>
- Megantara, S. (2013). *Upaya Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam Menggalang Dukungan Internasional untuk Kemerdekaan Papua* [Skripsi, UPN "Veteran" Yogyakarta]. <http://repository.upnyk.ac.id/7127/>
- Osman, M. N. M., & Waikar, P. (2018). Fear and Loathing: Uncivil Islamism and Indonesia's Anti-Ahok Movement. *Indonesia*, 106, 89–109.
- Rahab, A. al. (2016). Operasi-operasi Militer di Papua: Pagar Makan Tanaman? *Jurnal Penelitian Politik*, 3(1), 3–23. <https://doi.org/10.14203/jpp.v3i1.420>
- Schulze, K. E. (2002). Laskar Jihad and the conflict in Ambon. *The Brown Journal of World Affairs*, 9(1), 57–69.
- Schulze, K. E. (2019). From Ambon to Poso. *Contemporary Southeast Asia*, 41(1), 35–62.
- Syarif, M. I. (2016). Spirit Piagam Jakarta Dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3568>
- Teper, Y. (2016). Official Russian identity discourse in light of the annexation of Crimea: National or imperial? *Post-Soviet Affairs*, 32(4), 378–396. <https://doi.org/10.1080/1060586X.2015.1076959>
- theGuardian. (2021, Januari 7). Pro-Trump rioters storm US Capitol during vote on Biden election victory – video report. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/us-news/video/2021/jan/07/pro-trump-rioters-storm-us-capitol-during-vote-on-bidens-election-victory-video-report>
- Waltz, K. N. (2001). *Man, the state, and war: A theoretical analysis*. Columbia University Press.